

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan dicetus oleh Jensen & Meckling (1976) merupakan teori yang mengungkapkan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*). *Principal* adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi yaitu pemegang saham atau investor, sedangkan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen yaitu manajer (Kurniarsa, 2021). Menurut Jensen & Meckling (1976) berpendapat bahwasanya teori agensi menjelaskan adanya konflik yang timbul antara pemilik dan manajemen Perusahaan. Konflik inilah yang disebut dengan masalah agensi atau *agency problem*.

Pada penelitian ini pihak *principal* adalah investor atau pemegang saham, sedangkan pihak agen adalah manajemen perusahaan yang bekerja diperusahaan tersebut. Konflik keagenan terjadi karena perbedaan keinginan yang timbul antara pemilik dan manajer perusahaan, dimana pihak manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan *principal* (Yusmir & Mulyani, 2024).

Kaitan antara teori keagenan dengan kinerja keuangan tentu ada satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari pencapaian sasaran suatu perusahaan yaitu pengurus perusahaan atau yang disebut dengan manajemen perusahaan karena pencapaian dari tujuan kinerja keuangan tidak terlepas dari kinerja manajemen perusahaan itu sendiri. Dalam menjalankan kegiatannya seorang manajer perusahaan tentunya lebih banyak mendapatkan informasi dibanding dengan pihak *principal*. Hal ini tentunya membuat manajemen perusahaan bisa menggunakan kemampuannya untuk menguntungkan mereka salah satu contohnya adalah keuntungan. Keuntungan yang diperoleh manajemen akan membuat laporan keuangan yang tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, sehingga hal ini akan menyesatkan

pemegang saham mengenai kinerja keuangan atas saham yang di miliknya diperusahaan tersebut. Ketidakseimbangan informasi yang didapatkan dari pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dapat menimbulkan asimetri informasi.

Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilakukan perusahaan tentunya akan berdampak pada informasi keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin banyak pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diungkapkan maka akan membuat manajemen mendapatkan informasi yang akan menguntungkan mereka. Tidak hanya itu saja biaya yang dikeluarkan untuk mencapai SDGs di perusahaan tentunya akan berdampak pada kinerja keuangan. Ukuran perusahaan dapat menentukan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut. Menurut teori agensi, ukuran perusahaan digunakan sebagai kriteria bagi pemegang saham sebelum memutuskan pihak mana yang dapat dipekerjakan untuk memberikan layanan yang menguntungkan pemegang saham (Rahardjo, 2021). Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi yang akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

## **2.2 Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari suatu pencapaian dari keberhasilan dalam perusahaan atau diartikan sebagai hasil yang telah diperoleh suatu perusahaan dari berbagai operasional yang sudah dilakukan dan telah diidentifikasi sejauh mana sebuah perusahaan telah menggunakan aturan dalam melaksanakan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2013).

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah berbagai hasil yang didapat dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau tingkat pencapaian dari pelaksanaan dalam berbagai macam aktivitas dalam upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan visi dan misi dari suatu organisasi dan perusahaan yang sudah ditetapkan dalam perusahaan tersebut.

Menurut Hery (2016) kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan

Menurut Hutabarat (2020) kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang telah dicapai perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kinerja Keuangan adalah kinerja manajemen, yang merupakan perluasan nilai keuangan dan diperkirakan manfaatnya. Konsekuensi dari memperkirakan penanda keuangan sangat penting sehingga mitra dapat memahami status fungsional perusahaan dan tingkat pencapaian perusahaan.

### **2.2.1 Manfaat Kinerja Keuangan**

Menurut Gultom (2020) ada beberapa manfaat dari kinerja keuangan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengelola dalam pengoperasian organisasi dan perusahaan secara efektif dan efisien dengan cara dilakukan pemotivasian dari personal yang secara maksimum
- b. Untuk Membantu dalam cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan dari setiap personel seperti : promosi, transfer, dan pemberhentian
- c. Untuk Mengidentifikasi beberapa kebutuhan dari penelitian dan pengembangan dari personel dan untuk menyediakan kriteria untuk seleksi evaluasi program dan pelatihan personel.
- d. Untuk menyediakan sesuatu dari dasar yang digunakan untuk menjalankan penghargaan yang telah ditentukan perusahaan.

### **2.2.2 Tujuan Kinerja Keuangan**

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk diketahui karena dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan tergantung pada sudut pandang yang diambil dan tujuan analisis. Karena alasan itu, pihak manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi perusahaan dengan alat ukur penilaian kinerja yang akan digunakan serta tujuan pengukuran kinerja keuangan tersebut. Ada beberapa tujuan dari kinerja keuangan perusahaan (Munawir, 2004) yakni sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
4. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil

Kemampuan yang dimaksud yakni diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya. Dengan tujuan tersebut, penilaian kinerja keuangan mempunyai beberapa peranan bagi perusahaan. Menurut Ningrum (2022) Peranan itu antara lain dapat mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan, untuk menentukan atau mengukur efisiensi setiap bagian, proses atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, untuk menilai dan mengukur hasil kerja pada tiap-tiap bagian individu yang telah diberikan wewenang dan tanggungjawab, serta untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik .

Penilaian kinerja perusahaan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena berdasarkan hasil penilaian tersebut ukuran keberhasilan perusahaan selama satu periode tertentu dapat diketahui. (Rahayu, 2020) Kinerja keuangan dari definisi tersebut di atas adalah merupakan keberhasilan, prestasi atau kemampuan kerja perusahaan dalam rangka penciptaan nilai bagi perusahaan atau pemilik modal dengan cara-cara yang efektif dan efisien.

### **2.2.3 Pengukuran Kinerja Keuangan**

Menurut Nurzahra *et al.*, (2022) kinerja keuangan bisa diukur dengan beberapa rasio, salah satunya adalah rasio profitabilitas. Dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Net Profit Margin* (NPM). Alasan peneliti memilih *Net Profit Margin* (NPM) untuk mengukur kinerja keuangan dikarenakan NPM merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan bersih dan perbandingan antara laba bersih dan penjualan (Manalu, 2021). Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap penjualannya. Menurut Mirantika (2020) *Net Profit Margin* adalah ukuran utama untuk menentukan seberapa baik perusahaan yang dijalankan dan seberapa efisien dan baik perusahaan mengendalikan biaya. Apabila nilai dari *Net Profit Margin* semakin besar maka kinerja perusahaan semakin produktif serta adanya tingkat kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya diperusahaan tersebut.

### **2.3 Kualitas Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Kualitas *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan tingkat baik dan buruknya dari pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam bentuk komitmen untuk mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh dan merata. Kualitas SDGs menekankan serangkaian target yang mencakup berbagai tujuan-tujuan yang dijalankan perusahaan berkelanjutan dan tidak merugikan generasi mendatang (Dewi *et al.*, 2024).

Menurut Alisjahbana & Murniningtyas (2018) Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pilar sosial terdiri dari pemerataan, kesehatan, Pendidikan, keamanan, perumahan dan kependudukan. Pilar ekonomi terdiri dari struktur ekonomi, pola konsumsi dan produksi. Sedangkan pilar lingkungan terdiri dari atmosfer, tanah, pesisir dan laut, air bersih, keanekaragaman hayati. Ketiga pilar ini merupakan pilar yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Pilar lingkungan merupakan unsur terpenting karena pertumbuhan saat ini yang digambarkan dalam pilar ekonomi, perlu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Begitu juga dengan perilaku sosial masyarakat yang digambarkan dalam pilar sosial, perlu berubah dan memiliki perilaku yang ramah terhadap lingkungan.

SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan di setiap aspek kehidupan dan dalam pelaksanaannya mampu memberi manfaat kepada semua orang khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Pelaksanaan SDGs melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri dari Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas termasuk kelompok anak, perempuan, dan pemuda.

### 2.3.1 Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan tujuan pembangunan PBB yang terdiri dari 17 tujuan, yang terkait dengan empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola (Kementrian PPN, 2022). Adapun 17 tujuan itu sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

#### **Pengungkapan 17 Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

	<p>Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.</p>
---	---

	<p>Tujuan 2: Tanpa Kelaparan. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.</p>
	<p>Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.</p>
	<p>Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.</p>
	<p>Tujuan 5: Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.</p>
	<p>Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.</p>
	<p>Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.</p>
	<p>Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.</p>
	<p>Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.</p>
	<p>Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.</p>
	<p>Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.</p>
	<p>Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.</p>

	<p>Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.</p>
	<p>Tujuan 14: Ekosistem Laut. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan.</p>
	<p>Tujuan 15: Ekosistem Daratan. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.</p>
	<p>Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.</p>
	<p>Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.</p>

Sumber : Lampiran Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017

Selanjutnya ke-17 tujuan SDGs di atas dikelompokkan sebagai 4 pilar pembangunan berkelanjutan (Bappenas), yaitu:

1. Pilar pembangunan sosial terdiri dari tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, dan tujuan 5.
2. Pilar pembangunan ekonomi terdiri dari tujuan 7, tujuan 8, tujuan 9, tujuan 10, dan tujuan 17.
3. Pilar pembangunan lingkungan terdiri dari tujuan 6, tujuan 11, tujuan 12, tujuan 13, tujuan 14, dan tujuan 15.
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola terdiri dari tujuan 16.

Penetapan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menandakan bahwa Indonesia sangat berkomitmen dan bertekad untuk melaksanakan serta mewujudkan SDGs

dalam upaya perubahan peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas dan aktif di kancah dunia.

Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Pada POJK 51/2017 mewajibkan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk membuat dan mempublikasikan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report). Laporan ini harus memuat kinerja perusahaan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan harus dipublikasikan melalui situs web masing-masing paling lambat 30 April tahun berikutnya.

POJK 51/2017 mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs yang ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Keuangan Berkelanjutan membantu memastikan bahwa investasi dan kegiatan ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Variabel ini diukur dengan Indeks *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari 4 aspek pengungkapan terdapat 17 item yang kemudian disesuaikan kembali dengan masing-masing perusahaan. Perhitungan SDGs dilakukan dengan memberikan skor 1 jika suatu item diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor setiap perusahaan

### **2.3.2 Kategori Penilaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Kualitas pengungkapan terkait SDGs (*Sustainable Development Goals*) dalam laporan keberlanjutan perusahaan dapat bervariasi secara signifikan, tergantung pada seberapa detail dan relevan informasi yang diungkapkan. Untuk menilai kualitas pengungkapan SDGs, kita bisa melihat dari beberapa aspek utama, mulai

dari yang paling dasar hingga yang lebih komprehensif. Kualitas *Sustainable Development Goals* dibagi menjadi lima kategori utama yang mencerminkan kualitas pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) diberbagai negara. Kategori tersebut antara lain :

- a. Kategori pertama adalah sangat baik (>80%), di mana negara menunjukkan komitmen dan implementasi yang luar biasa dalam kebijakan dan program SDGs, menciptakan dampak positif yang signifikan.
- b. Kategori kedua, baik (70-80%), mencerminkan kemajuan yang konsisten, dengan kebijakan yang kuat namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai target yang lebih ambisius.
- c. Kategori ketiga, cukup baik (60-70%), menunjukkan bahwa negara telah membuat kemajuan, tetapi masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural yang menghambat pencapaian penuh.
- d. Kategori keempat, kurang baik (50-60%), terdapat indikasi bahwa meskipun ada upaya, negara masih harus berjuang dengan kebijakan yang tidak sepenuhnya efektif dan masalah yang mendalam dalam berbagai sektor.
- e. kategori sangat kurang baik (<50%) menggambarkan negara-negara yang menghadapi tantangan serius dalam mencapai SDGs, sering kali disebabkan oleh masalah mendasar seperti konflik, kemiskinan yang ekstrem, dan kurangnya infrastruktur dasar.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 mengharuskan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melaporkan laporan keberlanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, laporan keberlanjutan relevan dengan pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sangat penting, karena perusahaan diharapkan menjelaskan kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Integrasi SDGs dalam laporan keberlanjutan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, serta mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Dengan demikian, melalui implementasi POJK No. 51/2017, perusahaan tidak hanya

memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi aktif terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

#### **2.4 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan sebagai besar kecinya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dengan total aset perusahaan, log size, nilai pasar, saham dan lainnya. Ukuran perusahaan juga dapat digambarkan melalui total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan aset dan rata-rata total aktiva perusahaan (Maziyah & Indarti, 2019). Ukuran perusahaan dapat mencerminkan resiko yang dihadapi serta mempengaruhi pasar dalam pengambilan keputusan yang diukur dengan berbagai cara seperti total asset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar perusahaan (Sormin, 2024).

Manfaat dan tujuan dari ukuran perusahaan adalah untuk menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal, yang akan digunakan untuk mempertahankan nilai aset perusahaan, meningkatkan penjualan dan kapitalisasi pasar, memperbankan modal yang ditanam dan meningkatkan perputaran uang dalam perusahaan (Sari & Sulistiyowati, 2024).

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Namun menurut Bapepam No. 9 tahun 1995 berdasarkan ukuran, perusahaan dapat digolongkan atas 2 kelompok sebagai berikut:

##### **1. Perusahaan Kecil**

Perusahaan kecil merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia yang: (1) memiliki sejumlah kekayaan (total asset) tidak lebih dari Rp 20 miliar; (2) bukan merupakan afiliasi dan dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil; (3) bukan merupakan reksadana.

## 2. Perusahaan Menengah/Besar

Perusahaan menengah/besar merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar, maka akan dikenal masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor, karena perusahaan tersebut cenderung menjadi subjek penelitian publik sehingga perusahaan perlu merespon secara terbuka permintaan *stakeholders* (Dewi, 2024). Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kemungkinan suatu perusahaan untuk meningkatkan pelaporan keuangan dengan baik. Perusahaan yang sudah lama berdiri menunjukkan kestabilan perusahaan secara berturut-turut dan investor dapat meninjau kinerja perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka ketersediaan sumber daya informasi perusahaan semakin banyak dan perusahaan tersebut akan semakin dikenal oleh masyarakat dan juga oleh investor. Perusahaan besar cenderung memberikan lebih banyak detail dalam laporan keuangan mereka dibandingkan perusahaan kecil (Wijaya *et al.*, 2024).

Ukuran Perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Logaritma Natural (Ln) dari total aset perusahaan. Alasan pemilihan pengukuran tersebut dikarenakan besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari total aktiva atau aset perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Apabila perusahaan memiliki total aset yang besar maka pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset perusahaan. Kebebasan ini sama dengan kekhawatiran yang dirasakan pemilik terhadap asetnya (Mundji, 2022). Aset yang besar akan menurunkan kinerja keuangan dari sisi pemilik perusahaan. Namun jika dilihat dari sisi manajemen akan meningkatkan kinerja keuangan karena manajemen memiliki kemudahan dalam mengendalikan perusahaan.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperluas dan memperdalam berbagai teori yang akan digunakan di dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini.

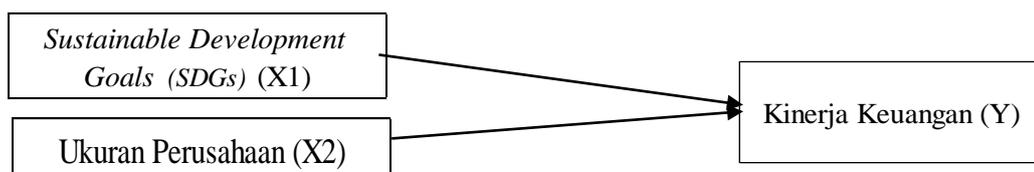
**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alfiah & Arsjah (2021)	Pengungkapan Terkait SDGs dan Profitabilitas serta Analisis Industri	Y : Kinerja Keuangan X : Pengungkapan SDGs	Pengungkapan SDGs berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan yang diukur dengan Rasio Profitabilitas yaitu ROA
2.	Arifianti & Widianingsih (2022)	Kualitas Pengungkapan SDGs dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan	Y : Kinerja Keuangan X : Pengungkapan SDGs dan Ukuran Perusahaan	Kualitas Pengungkapan SDGs tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
3.	Ernawati & Santoso (2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan	Y : Kinerja Keuangan X : Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan <i>Leverage</i>	Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

4.	Mundji (2022)	Pengaruh Modal Intelektual, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan	Y : Kinerja Keuangan  X : Modal Intelektual, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan	Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan Modal Intelektual dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
5.	Janah & Poerwati (2024)	Pengaruh SDGs, <i>Intellectual Capital</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan	Y : Kinerja Keuangan  X : SDGs, <i>Intellectual Capital</i> dan Ukuran Perusahaan	<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> dan <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

## 2.6 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan menguji ada tidaknya hubungan antara variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan, variabel independen yaitu Kualitas Pengungkapan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan Ukuran Perusahaan. Adapun hasil uraian tersebut maka peneliti membuat kerangka penelitian sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

## **2.7 Banguan Hipotesis**

### **2.7.1 Pengaruh Kualitas Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Kinerja Keuangan**

Kualitas Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan tingkat baik dan buruknya dari pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam bentuk komitmen untuk mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh dan merata, seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, dan memastikan akses yang lebih baik terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sumber daya energi (Amirya & Irianto, 2023).

Penerapan Kualitas Pengungkapan SDGs ini berdampak pada citra perusahaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan perusahaan ikut andil dalam memajukan pembangunan negara salah satunya dengan menyampaikan dan melaporkan kepada investor dalam bentuk *Sustainability Report* baik dalam aspek kinerja ekonomi, sosial maupun lingkungan yang nantinya digunakan investor dalam pengambilan keputusan (Jannah & Poerwati, 2024).

*Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam strategi bisnis berkontribusi untuk meningkatkan keuangan karena berbagai alasan termasuk integrasi sistem yang meningkatkan pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya yang efisien, yang mengurangi biaya, output jangka panjang yang lebih baik, pengembangan produk bernilai tambah melalui inovasi dan keramahan sosial. Dengan strategi tersebut tentunya berdampak pada keuntungan atau laba yang diperoleh dari perusahaan. Apabila biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berkurang maka akan meningkatkan profitabilitas perusahaan yang berdampak pada kinerja keuangan.

Berdasarkan teori keagenan, SDGs, dan kinerja keuangan adalah hubungan yang saling terkait dan saling menguntungkan. Pengungkapan SDGs yang didorong oleh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (teori keagenan) dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui berbagai cara, termasuk meningkatkan

kepercayaan stakeholder, mengurangi biaya keagenan, dan mendorong inovasi. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan teori keagenan dalam konteks SDGs sangat penting untuk mencapai keberlanjutan bisnis dan meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang (Indriani, 2025).

Suatu perusahaan yang telah menerapkan dan mengungkapkan SDGs bisa dikatakan perusahaan tersebut berkualitas. Tentunya memberikan dampak yang baik pada perusahaan seperti selain mudah mencapai pembangunan berkelanjutan, perusahaan juga mendapatkan citra yang baik dihadapan pemangku kepentingan. Sehingga dari dampak tersebut tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Alfiyah & Arsjah (2021) dan Jannah & Poerwati (2024) yang menyatakan bahwa Kualitas Pengungkapan *Sustainable Development Goals (SDGs)* berpengaruh terhadap Kinerja keuangan karena semakin banyak pengungkapan SDGs yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi pula kinerja keuangannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Kualitas Pengungkapan *Sustainable Development Goals (SDGs)* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan

### **2.7.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan**

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan ditinjau dari aset, penjualan, atau kapitalisasi pasar (Sormin, 2024). Ukuran perusahaan dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan yang di ukur dengan rasio profitabilitas yakni ROA mempunyai kaitan dengan laba dan aset. Perusahaan yang berukuran besar tentunya mempunyai kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil (Ernawati & Santoso, 2022).

Semakin besar perusahaan cenderung memiliki kekuatan dan kemampuan memperoleh laba tinggi karena ditunjang dengan aset yang besar.

Rantika *et al.*, (2022) mengatakan bahwa ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor laba yang dihasilkan perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dapat dimungkinkan mempengaruhi ROA sebuah perusahaan. Selain itu, perusahaan besar memiliki kemungkinan lebih besar dikenal oleh masyarakat luas dan juga sebagai penentu tingkat kepercayaan investor. Perusahaan dengan ukuran besar lebih mudah dalam memperoleh dana dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar pula kesempatan perusahaan dalam menarik perhatian masyarakat. Menurut Jannah & Cahyono (2022) Perusahaan besar mempunyai peluang untuk menguasai pasar, banyaknya aset dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan profitabilitas.

Berdasarkan teori keagenan, teori agensi memberikan kerangka kerja untuk memahami hubungan antara ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dan konflik kepentingan antara principal dan agent. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik karena memiliki lebih banyak sumber daya dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kinerja keuangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Jannah & Cahyono (2022), Arifianti & Widianingsih (2022) dan Pratiwi & Herawati (2022) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan dikarenakan besar kecilnya perusahaan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan